

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. *Pertumbuhan Pendidikan Dasar*

Sistem pendidikan suatu bangsa merupakan refleksi dari kelebihan dan kekurangan budaya masyarakat itu sendiri, yang di dalamnya mengandung falsafah, nilai-nilai, politik, adat istiadat dan kebiasaan yang turut mewarnai kehidupan individu dalam peranan kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Tilaar (1990:30) mengungkapkan "*Pendidikan harus dilihat sebagai salah satu kekuatan sosial yang ikut memberi bentuk, corak dan arah pada kehidupan masyarakat masa depan*". Itulah sebabnya, pendidikan telah dipandang sebagai salah satu hak asasi dan konstitusional. Atas dasar itu, maka sistem pendidikan nasional (SPN) juga mengandung makna hak asasi dan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII Pasal 31 menegaskan bahwa

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran;*
- (2) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.*

Bertolak dari pandangan di atas, maka pihak Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

sejak tahun 1970 dengan bantuan Ford Foundation telah mendirikan proyek *Penilaian Nasional Pendidikan*. Proyek ini bertujuan mengembangkan strategi pembangunan pendidikan, dengan harapan dapat dijadikan suatu pola pelaksanaan pendidikan yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan.

Pada Pelita I pertumbuhan pendidikan dasar yakni setingkat SD 6 tahun, tercatat 65.589 SD yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan SD tersebut dilaksanakan oleh pemerintah 83% dan selebihnya masyarakat (swasta). Dalam kurun waktu Pelita I jumlah partisipasi siswa SD rata-rata 0,8 juta, yaitu pada tahun 1969 tercatat 12,8 juta dan pada tahun 1973 meningkat 13,6 juta. Persoalan yang muncul saat itu adalah pada keterbatasan fasilitas, gedung-gedung sekolah hanya sekitar 50% yang permanen; selain itu, 10 sampai dengan 15% yang belum memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pembangunan fasilitas (gedung) dan pengangkatan tenaga pendidik (guru) melalui program Inpres. Data dalam Tabel 1 menunjukkan perkembangan jumlah peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama kurun waktu Repelita I sampai dengan Repelita V.

**TABEL 1**  
**PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA DIDIK SD 6 TAHUN DAN SLTP**  
**REPELITA I - V (1969/1970 SAMPAI DENGAN 1993/1994)**

REPELITA	TAHUN	PESERTA DIDIK	
		SD 6 TAHUN	SLTP 3 TAHUN
I	1969	12.802.415	1.234.795
	1970	12.821.618	1.292.230
	1971	12.898.147	1.400.873
	1972	13.030.548	1.441.556
	1973	13.069.456	1.535.701
II	1974/1975	13.707.866	1.691.078
	1975/1976	14.280.157	1.900.154
	1976/1977	15.550.124	2.136.067
	1977/1978	17.265.291	2.339.835
	1978/1979	19.074.819	2.982.592
III	1979/1980	21.165.724	2.763.976
	1980/1981	22.551.870	3.412.116
	1981/1982	23.662.477	3.809.348
	1982/1983	24.700.075	4.272.116
	1983/1984	25.804.380	4.757.608
IV	1984/1985	26.567.688	5.188.964
	1985/1986	26.550.915	5.669.966
	1986/1987	26.444.756	6.132.057
	1987/1988	26.649.890	6.422.423
	1988/1989	26.725.364	6.446.966
V	1989/1990	26.528.590	5.852.507
	1990/1991	26.348.376	5.686.118
	1991/1992	26.325.701	5.604.515
	1992/1993	26.339.995	5.576.400
	1993/1994	26.231.700	5.746.300

*Sumber: Pusat Informasi Balitbang Depdikbud Jakarta (1996)*

Pada pelita II terjadi perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan perekonomian, stabilitas politik di dalam negeri, dan kepercayaan luar negeri yang semakin mantap. Pelita III yakni tahun 1979/1980 sampai tahun 1983/1984,

*titik berat pembangunan pendidikan dilakukan pada peningkatan perluasan pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar 6 tahun.* Sebagai perwujudan program ini adalah peningkatan jumlah guru-guru SD, dan penambahan gedung-gedung sekolah.

Dalam Pelita IV program pembinaan pendidikan dasar, diprioritaskan pada *perluasan kesempatan memperoleh pendidikan di dalam dan di luar sekolah.* Program ini mencakup penyediaan fasilitas belajar pada tingkat SD bagi semua anak usia 7-12 tahun, melalui pembinaan SD, SDLB dan MI (Madrasah Ibtidaiyah), serta penyelenggaraan program paket A. Pada tahun 1986/1987 anak-anak usia 7-12 tahun telah dianggap memperoleh pendidikan secara merata di seluruh pelosok Indonesia.

Dalam Pelita V kebijakan pembangunan pendidikan dasar telah *Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak usia 6 tahun untuk memasuki SD.* Hal ini dimungkinkan karena anak usia 7-12 tahun pada dasarnya telah tertampung di SD. Di samping itu, kebijakan diprioritaskan pula untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan SLTP dalam rangka merintis *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun* yang dicanangkan pada repelita VI.

Memperhatikan perkembangan pendidikan dasar selama PJPT I seperti tersebut di atas maka dapat diungkapkan,

beberapa kemajuan yakni :

*a. Pertumbuhan Kuantitas Peserta Didik*

Secara kuantitas dalam kurun waktu 25 tahun, terjadi kenaikan rata-rata jumlah peserta didik pada *Sekolah Dasar 6 tahun* mencapai (APK) 48,8%, dan untuk *Sekolah Lanjutan Pertama 3 Tahun* mencapai (APK) 21,49%.

*b. Perkembangan Kebijakan Pendidikan*

Dalam kurun waktu 25 tahun pembangunan pendidikan yang mendapat prioritas yakni, terselenggaranya *Wajib Belajar 6 tahun* bagi penduduk berusia 7-12 tahun yang mulai dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 Mei 1984. Keberhasilan program Wajib belajar 6 tahun adalah dapat meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak berusia 7-12 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar 6 tahun. Selain itu dihasilkan suatu kebijakan nasional yang sangat mendasar yakni lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989. UUSPN tersebut ditindak lanjuti dengan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan pedoman pelaksanaannya.

Perkembangan di atas merupakan suatu landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional pada PJPT II, sehingga hasil perolehan pada PJPT I yang menyangkut

pertumbuhan secara kuantitas baik sarana dan prasarana, maupun perangkat acuan yakni perundang-undangan, dan peraturan yang dapat dijadikan landasan konstitusional dapat meningkat.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 menegaskan "*pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah*". Jalur pendidikan sekolah adalah "*Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan berkesinambungan*". Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah meliputi "*Pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat*". Dengan demikian dalam menentukan arah kebijakan pendidikan dasar, telah dikembangkan melalui dua jalur pendidikan. UUSPN No.2 Tahun 1989 pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa :

*"Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah"*

Makna dari isi ayat di atas berupa gambaran bahwa pendidikan dasar merupakan hak asasi manusia baik sebagai pribadi dalam mengembangkan potensinya, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara dan anggota umat manusia.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masa depan, UUSPN No.2 Tahun 1989 menegaskan bahwa "*Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 (tiga) tahun di Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat*". Oleh karena itu Pemerintah melalui berbagai upaya selalu memberikan perhatian terhadap pendidikan dasar, yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pada awal Pelita VI yakni tanggal 2 Mei 1994 Pemerintah melalui Presien RI telah mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun).

## *2. Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Permasalahannya*

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang memiliki peranan strategis dan mendasar dalam menghasilkan manusia yang berkualitas. Pada jenjang pendidikan dasar inilah kemampuan dan keterampilan dasar dikuasai peserta didik. Hal ini akan merupakan bekal untuk pendidikannya lebih lanjut dan untuk menempuh kehidupannya di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu pendekatan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, yang dilandasi oleh konsepsi administrasi pendidikan dan dilaksanakan secara baik.

Penyelenggaraan pendidikan dasar dituntut mampu mengelola segala potensi sumber daya internal dan eksternal, yang pada dasarnya meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pengaturan sumber-sumber daya yang ada. Dalam UUSPN No.2 Tahun 1989 dijelaskan bahwa, "*Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah*". Oleh karena itu untuk mengatur tanggung jawab termaksud, maka telah diterbitkan PP.No.39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional. Bab II pasal 2 dari PP tersebut menegaskan bahwa "*Peranserta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional*". Dalam pasal 3 dari PP yang sama ditegaskan bahwa "*Peranserta masyarakat bertujuan memanfaatkan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional*".

Namun demikian dalam konteks pengelolaan pendidikan dasar, masih mempunyai persoalan dasar, yakni adanya dua instansi yang terkait secara hirarkhi struktur kelembagaan khususnya mengenai pendidikan dasar 6 tahun. Hal ini berkaitan dengan PP.No.58 Tahun 1951 dan PP. No.28 Tahun 1990, tentang komponen-komponen pengelolaan Sekolah Dasar menunjukkan sepertinya terdapat persamaan berkenaan dengan

adanya pengelolaan sumber-sumber. Walaupun secara distribusi sangat jelas akan tetapi terkadang timbul tumpang tindih garapan. Salah satu contoh pengelolaan SDM tenaga kependidikan sering berbeda kepentingan, sehingga dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pelayanan. Sedangkan untuk SLTP pengelolanya dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Kantor Wilayah Depdikbud.

TABEL 2  
KETERKAITAN PERATURAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Komponen-Komponen Penyelenggaraan Pendidikan SD 6 Th	PP.No.58/1951		PP.No.28/1990	
	Pusat Daerah		Pusat Daerah	
1.Tenaga Kependidikan				
a. Pengadaan	-	V	V	-
b. Pendayagunaan	-	V	V	-
c. Pengembangan	-	V	V	-
2.Pengadaan Sarana				
a. Tanah	-	V	-	V
b. Gedung	-	V	-	V
c. Alat Pendidikan	V	-	V	-
3.Dana	-	V	V	V

Sumber: Dokumentasi Depdikbud Jakarta (1996)

Selain itu untuk pendidikan dasar 6 tahun, dan SLTP 3 Tahun yang dikelola secara khusus oleh Departemen Agama R.I, yakni MI dan MTs.

Untuk penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun, tentunya diperlukan suatu *koordinasi*, sebab dalam pengelolaan

program yang bersifat nasional keadaannya lebih kompleks. Salah satu pendekatan dalam administrasi adalah perlu keterpaduan yang didasarkan kepada norma dan keadaan yang berlaku, dalam berbagai dimensi; pemerintah, swasta, pengusaha, tenaga kerja, pendidik, ilmuwan, politikus, ulama dan sektor lainnya. Atas dasar itu diperlukan adanya keterpaduan pemikiran dan lain sebagainya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tanpa adanya suatu koordinasi maka administrasi atau manajemen tidak akan berfungsi dengan baik (Terry, 1962). Oleh karena itu, sangat tepat upaya pemerintah mengatur kepentingan tersebut melalui PP.No.6 Tahun 1988. Salah satu pasalnya menjelaskan tentang makna koordinasi, ialah :

*Ada tiga macam koordinasi, yakni koordinasi fungsional, koordinasi instansional, dan koordinasi teritorial.*

*Koordinasi fungsional yaitu koordinasi antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.*

*Koordinasi instansional yaitu koordinasi terhadap beberapa instansi mengenai satu urusan tertentu yang bersangkutan.*

*Koordinasi teritorial yaitu koordinasi terhadap dua atau lebih variabel wilayah dengan program tertentu.*

Acuan dasar termaksud merupakan landasan untuk ditindak lanjuti.

Salah satu wujud pelaksanaan tindak lanjut yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun, yang disusul oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra No.18/Kep/Menko/Kesra/X/1994. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa "*Pelaksanaan koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun dilaksanakan oleh Tim Koordinasi*".

Tim koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun yang dibentuk mulai dari tingkat *pusat* sampai *wilayah*, terdiri dari berbagai instansi terkait dengan Departemen Pendidikan sebagai *leading sector*. Melaksanakan program, tentunya diperlukan suatu komunikasi, interaksi, serta peranserta secara teratur dan diperlukan suatu iklim organisasi yang sehat.

Sebagai gambaran hasil perolehan program Wajar Dikdas 9 tahun, sejak perintisan tahun 1993/1994 sampai dengan 1996/1997, di propinsi Jawa Barat menggunakan salah satu tolok ukur keberhasilan, yaitu *Angka Partisipasi penduduk usia 13 sampai 15 tahun di SLTP/sederajat*. Hal ini dikenal sebagai *Angka Partisipasi Kasar (APK/GER)* dan *Angka Partisipasi Murni (APM/NER)*. Untuk lebih jelasnya dari hasil studi pendahuluan dapat diungkapkan informasi di bawah ini.

Pertama : Perkembangan Secara Umum Wajar Dikdas 9 Tahun

Perkembangan penduduk usia 7 - 12 dan 13 - 15 tahun berdasarkan data statistik, dilihat dari populasi, enrolment, dan APK/APM secara umum pada posisi Nasional, Propinsi Jawa Barat dan Kotamadya Bandung.

**TABEL 3**  
**PERKEMBANGAN HASIL PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN**  
**PERIODE 1993/1994 SAMPAI DENGAN 1996/1997**

NO	KEADAAN	TAHUN	NASIONAL	PROP. JABAR	KDY. BANDUNG
1	Populasi Usia 7 - 12 Tahun	93/94	24.685.932	4.934.984	270.038
		94/95	26.167.087	5.634.203	271.836
		95/96	27.648.243	6.299.116	273.619
		96/97	27.795.543	6.781.462	275.476
	13 - 15 Tahun	93/94	13.243.699	2.677.101	158.771
		94/95	13.488.289	2.725.359	164.297
		95/96	13.499.200	2.754.100	154.304
		96/97	13.470.729	2.764.700	158.934
2	Enrolment 7 - 12 Tahun	94/95	24.075.061	5.566.592	162.324
		95/96	27.316.646	5.960.236	152.452
		96/97	31.417.657	6.032.628	272.170
		APK/APM (%)	94/95	92,00/83,44	98,80/67,34
	95/96	98,98/87,99	94,62/69,99	55,71/51,51	
	96/97	113,03/89,96	88,95/73,28	98,07/82,21	
	13-15 Tahun	94/95	5.563.187	1.119.290	111.540
		95/96	6.298.726	1.273.623	119.618
		96/97	6.937.425	1.363.326	154.304
	APK/APM (%)	94/95	58,02/41,50	48,85/39,98	70,23/59,37
		95/96	62,65/46,66	55,77/48,31	72,86/58,06
		96/97	68,74/50,36	58,83/48,76	77,51/60,06

Sumber: Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat (1997)

Data pada Tabel 3 di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

*Perkembangan penduduk* usia 7 - 12 dan 13 - 15 tahun dalam kurun waktu 1993/1994 (Tahun pertama) sampai dengan 1996/1997. Rata-rata pertumbuhan anak usia 7-12 tahun pada tingkat nasional 3,9%, tingkat propinsi 9,07%, tingkat kodya 0,99%. Rata-rata pertumbuhan anak usia 13-15 tahun pada tingkat nasional 1,68%, tingkat propinsi 3,16%, tingkat kodya 0,10%. Memperhatikan kondisi tersebut *posisi* propinsi Jawa Barat dalam hal pertumbuhan penduduk yang berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun *melebihi tingkat nasional*. Akan tetapi untuk tingkat kotamadya Bandung *posisi* pertumbuhannya baik terhadap propinsi, maupun nasional, masih *relatif kecil*.

*Enrolment dan APK/APM*, pada Tabel 3 di atas menunjukkan: APK untuk tingkat nasional tahun 1994/1995-1995/1996 terjadi kenaikan 4,63%, tahun 1995/1996 - 1996/1997 naik lagi menjadi 6,09%, atau rata-rata kenaikan nasional selama kurun waktu tersebut 5,36%. Sedangkan APM yang dicapai pada tahun 1994/1995 - 1995/1996 terjadi kenaikan 5,16%, tahun 1996/1997 naik 3,70%, atau rata-rata kenaikan 4,43%.

Pada tingkat propinsi Jawa Barat ternyata APK untuk tahun 1995/1996 menunjukkan adanya kenaikan 6,92%, tahun 1995/1996 naik 3,99%, atau kenaikan rata-rata 4,99%.

Pencapaian APM pada tahun 1994/1995 - 1995/1996 terjadi kenaikan 8,33 %, tahun 1995/1996 - 1996/1997 naik 0,16%, atau rata-rata kenaikan 4,25%.

Pada tingkat Kodya menunjukkan APK pada tahun 1994/1995 - 1995/1996 terjadi kenaikan 2,63%, tahun 1995/1996 - 1996/1997 naik 4,65%, atau kenaikan rata-rata 3,64%. Pencapaian APM pada tahun 1994/1995 - 1996/1997 naik 2%, atau kenaikan rata-rata hanya 0,7%.

Memperhatikan kondisi di atas, jika dibandingkan dengan APK/APM pada tingkat nasional maka kedua indikator itu dapat diungkapkan bahwa posisi APK propinsi lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu 0,37%, sedangkan APM lebih tinggi 0,45%. Demikian pula posisi APK rata-rata kotamadya Bandung terhadap propinsi lebih rendah dari 1,35% dan APM rata-rata lebih rendah 3,45%.

Makna dari informasi tersebut ialah upaya penyelenggaraan Wajar Dikdas di tingkat propinsi Jawa Barat masih rendah dibanding tingkat nasional. Demikian juga, upaya penyelenggaraan Wajar Dikdas yang telah dicapai kotamadya Bandung dibandingkan sasaran yang harus dicapai masih rendah dan perlu ditingkatkan.

Implikasinya, ditinjau dari manajemen penyelenggaraan pendidikan, khususnya pelaksanaan Wajar Dikdas 9

Tahun di Kodya Bandung itu sangat perlu untuk dilakukan penyempurnaan.

**Kedua: Angka Melanjutkan Sekolah Propinsi Jawa Barat dan Kotamadya Bandung**

Untuk propinsi Jawa Barat tabel 4 menunjukkan bahwa angka melanjutkan lulusan SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 1996/1997 mengalami peningkatan sebesar 3,61% dari tahun 1995/1996. Pada tahun 1996/1997 daya serap Kejar Paket B meningkat dari 1,55% menjadi 7,15%. Berdasarkan data empiris ditunjukkan pada Tabel 4, tentang keadaan angka melanjutkan lulusan SD/MI di propinsi Jawa Barat selama kurun waktu 1994/1995 sampai dengan 1995/1996.

**TABEL 4**  
**ANGKA MELANJUTKAN LULUSAN SD/MI TAHUN 1994/1995**  
**1995/1996 DAN 1996/1997 KE SLTP YANG SEDERAJAT**  
**DI PROPINSI JAWA BARAT DAN KOTAMADYA BANDUNG**

LULUSAN SD/MI	ANGKA MELANJUTKAN							
	TAHUN LULUS	JUMLAH LULUSAN	TAHUN MELAN- JUTKAN	JALUR SEKOLAH		LUAR SEKOLAH		JUMLAH %
				JUM- LAH	%	JUM- LAH	%	
<u>Prop:</u>								
93/94	789.189	94/95	586.173	74,40	75.418	9,56	83,96	
94/95	799.967	95/96	600.189	75,18	13.334	1,55	76,73	
95/96	823.864	96/97	652.775	79,23	59.269	7,19	86,43	
<u>Kodya:</u>								
93/94	43.800	94/95	42.618	97,30	492	1,33	98,65	
94/95	41.636	95/96	40.439	97,13	697	1,67	98,80	
95/96	40.251	95/96	39.069	97,06	743	1,85	98,91	

*Suber: Kanwil Depdibud Propinsi Jawa Barat (1997)*

Data dalam Tabel di atas menunjukkan bahwa angka lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SLTP melalui jalur sekolah, mulai tahun 1993/1994 sampai dengan 1996/1997 rata-rata 4,83%. Angka melanjutkan jalur luar sekolah, pada awal tahun diprogramkan melalui paket B mampu menyerap angka transisi 9,56%. Namun pada tahun 1994/1995 mengalami penurunan yang drastis yakni hanya 1,55% dan pada tahun 1995/1996 naik menjadi 7,18%.

Data dalam Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa angka lulusan SD/MI ke SLTP sederajat melalui jalur sekolah, pada tahun 1996/1997 mencapai 39,069 atau 97,06%. Pada tahun yang sama melalui jalur luar sekolah (Paket B), 160 siswa atau 0,40%, pondok pesantren mencapai 481 orang atau 1,2% dan kursus mencapai 102 orang atau 0,25%, sehingga jumlah melanjutkan di luar sekolah 743 orang atau 1,85%.

Interpretasi, angka melanjutkan lulusan SD/MI pada tingkat propinsi Jawa Barat pada jalur sekolah masih dominan dibandingkan dengan jalur luar sekolah. Demikian juga di tingkat Kodya Bandung pada jalur sekolah masih lebih diminati dibandingkan jalur luar sekolah.

Implikasinya terhadap manajemen penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah dan jalur luar sekolah perlu ada

penyempurnaan, khususnya berkenaan dengan optimalisasi sumber-sumber daya pendidikan.

**Ketiga: Angka Partisipasi Penduduk Usia 13-15 Tahun di Jalur Sekolah dan Jalur Luar Sekolah**

Untuk melihat perkembangan angka partisipasi penduduk usia 13-15 tahun di jalur sekolah dan jalur luar sekolah pada tahun 1996/1997, dapat ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini.

**TABEL 5**  
**APK DAN APM USIA 13-15 JALUR SEKOLAH**  
**DAN JALUR LUAR SEKOLAH TAHUN 1996/1997**

TINGKAT KELOMPOK	NASIONAL		PROPINSI JABAR		KODYA BANDUNG	
APK:						
JML PEND. 13-15	13.470.729		2.800.128		158.934	
- SLTP	7.246.050		1.289.965		120.912	
- MTs	1.380.763		385.447		5.990	
- SLTP TERBUKA	121.830		19.987		0	
- PAKET B	315.755		20.503		658	
JAMLAH	9.064.396	67,29%	1.715.902	61,52%	127560	80,26
APM:						
- SLTP	5.619.936		1.061.332		91.328	
- MTs	1.069.600		305.045		5.138	
- SLTP TERBUKA	94.109		18.711		0	
- PAKET B	153.344		9.238		658	
JUMLAH	6.936.989	51,50%	1.394.326	49,99%	97.124	61,11

Sumber: Depdikbud Jakarta (1997)

Data dalam Tabel 5 di atas menunjukkan APK dan APM usia 13-15 tahun, berdasarkan partisipasi pendidikan baik jalur

sekolah maupun jalur luar sekolah. Pada tingkat nasional tahun 1996/1997 APK mencapai 67,29% dan APM 51,50%. Propinsi Jawa Barat pada tahun 1996/1997 APK mencapai 61,52% dan APM 49,99%. Kotamadya Bandung pada tahun yang sama APK mencapai 80,26% dan APM 61,11%. Keadaan ini menempatkan posisi propinsi Jawa Barat di bawah pencapaian nasional. Sebagai bahan perbandingan, APK - APM mencapai 11,53% sedangkan nasional mencapai 15,79%, artinya perbedaan antara APK dan APM sebesar 4,26%.

Interpretasi, penyelenggaraan di tingkat Kotamadya Bandung pencapaian APK maupun APM lebih tinggi dibandingkan dengan APK - APM tingkat propinsi, demikian pula dibandingkan dengan APK - APM tingkat nasional. Walaupun untuk jalur sekolah khususnya SMP Terbuka dan jalur luar sekolah belum terinventarisir untuk periode 1996/1997.

Implikasi dari peningkatan ketercapaian APK dan APM adalah peningkatan layanan dan pengelolaan sumber-sumber pendidikan di Kotamadya Bandung.

#### Keempat: Kondisi Daya Tampung SLTP di Propinsi Jawa Barat

Pada tahun ajaran 1996/1997 di propinsi Jawa Barat tercatat 28.467 ruang kelas (RK). Menurut data rata-rata rasio RK : Murid di propinsi Jawa Barat pada tahun ajaran 1996/1997 1 : 44. Artinya total daya tampung SLTP/MTs

negeri dan swasta adalah 1.252.548 siswa. Daya tampung ini baru mencapai 81,65% dari jumlah total siswa SLTP/Mts yang jumlahnya 1.534.018 siswa. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Jawa Barat masih mengalami kekurangan daya tampung bagi 281.470 siswa atau 6.397 RK.

Pada tahun 1996/1997 di kotamadya Bandung terdapat 2.198 ruang kelas (RK). Menurut data, rata-rata rasio RK: Murid adalah 1 : 42, total daya tampung SMP/MTs negeri dan swasta adalah 92.316 siswa, daya tampung ini baru mencapai 77,19% dari jumlah total siswa yang mencapai 119.601 siswa. Sebagai bahan perbandingan ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini.

TABEL 6  
JUMLAH RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR, DAN KEKURANGAN RUANG KELAS SLTP/MTs TAHUN 1995/1996 DAN 1996/1997

TINGK	JUMLAH RUANG KELAS				JUMLAH ROMBEL			
	SMPN	SMPS	MTs	JUMLAH	SMPN	SMPS	MTs	JUMLAH
Prop : 95/96	11.80	8.380	8.170	28.467	19.08	9.544	9.013	37.565
96/97	12.57	8.735	8.170	29.407	dalam proses pengolahan			
Kodaya 95/96	665	1.335	178	2.198	1.143	1.482	219	642

Sumber : Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat (1997)

Data dalam Tabel di atas, menyiratkan bahwa angka double shift ruang kelas SMP/MTs di Jawa Barat mencapai 1,32. Selain itu angka-angka yang tertera menunjukkan jumlah RK

SLTP pada tahun 1996/1997 baru mencapai 75,8%. Pada tingkat kodya SMP negeri baru mampu memenuhi 24,05% dari kebutuhan RK, SMP swasta 46,88% dan MTs negeri dan swasta 6,25%. Dari kondisi ini menunjukkan peran swasta dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung, cukup besar.

**Kelima: Keadaan Guru SLTP di Tingkat Propinsi Jawa Barat dan Kotamadya Bandung**

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 7 pada halaman 21, guru SMP/MTs negeri dan swasta di propinsi Jawa Barat 73,193 orang. Angka ini baru mencapai 83,68% dari jumlah yang dibutuhkan 87,466 orang, sehingga masih kekurangan guru sebesar 16,32%.

Di kodya Bandung guru SMP/MTs negeri dan swasta berjumlah 5.022 orang, jumlah guru SMP negeri baru mencapai 86,13% dari yang dibutuhkan, sedangkan SMP swasta dan MTs secara umum mencapai 75,15%. Angka ini menggambarkan bahwa sebagian besar guru di SMP Negeri dan Swasta serta MTs bekerja melebihi jumlah jam mengajar.

Implikasi dari jumlah guru yang masih kurang, diperlukan kebijakan untuk mengangkat guru baru.

TABEL 7  
 JUMLAH GURU YANG ADA DAN YANG DIBUTUHKAN  
 DI PROPINSI JAWA BARAT DAN KOTAMADYA BANDUNG  
 TAHUN AJARAN 1996/1997

TINGKAT	SMPN	SMPS	MTS	JUMLAH
Propinsi				
Yang ada	25.062	24.570	23.561	73.193
Dibutuhkan	44.110	22.266	21.090	87.466
Kotamadya				
Yang ada	2.297	2.244	481	1.614
Dibutuhkan	2.667	3.551	551	6.636

Sumber : Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat (1997)

Menyimak hasil informasi sesuai dengan studi peninjauan, meskipun kenaikan rata-rata APK dan APM pada tingkat kotamadya Bandung melebihi, dari propinsi Jawa Barat serta nasional, namun angka-angka kenaikan ini masih perlu ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan hasil yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk memberdayakan *peranserta masyarakat*, dan semua pihak lain yang berkepentingan (*stake holders*).

Menurut perolehan informasi awal, melalui studi peninjauan di lingkungan *Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun* di kotamadya Bandung khususnya, ditemukan beberapa aspek yang masih menjadi persoalan yang dihadapi antara lain.

(1) *Kondisi Geografis*

Kondisi dan karakteristik kotamadya Bandung masih

terdapat perbedaan laju perkembangan pembangunan, antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, sedangkan lahan yang dibutuhkan untuk membangun UGB SLTP sulit dicari.

(2) *Keadaan Guru*

Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun masih dihadapkan pada persoalan tenaga kependidikan khususnya guru SLTP, yaitu :

- a. Kurikulum 1994 menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan kualitas kerja guru, yaitu dengan batasan jumlah jam wajib mengajar 18 jam per minggu. Hal ini terkait dengan penambahan tenaga guru yang tentunya sangat ditentukan oleh kemampuan dana;
- b. Pola pemerataan penyebaran guru belum tepat, masih ditemukan sekolah-sekolah di pusat kota mengalami kelebihan, sedangkan di daerah pengembangan atau perluasan kota mengalami kekurangan;
- c. Masih ditemukan adanya kebutuhan kualifikasi yang sesuai antara mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan guru. Hal ini belum sesuai dengan tuntutan.

(3) *Daya Tampung*

Daya tampung khususnya SLTP Negeri masih terbatas, sementara banyak orang tua lebih percaya menyekolahkan anaknya ke SLTP Negeri.

(4) *Pengadaan Lahan UGB*

- a. Ketidak sesuaian harga lahan UGB SLTP yang dialokasikan APBN dengan harga lahan di perkotaan, sehingga sulit untuk mendapatkan lahan yang memadai;
- b. Masih rendahnya partisipasi pengembang kawasan perumahan untuk penyediaan fasilitas sosial, termasuk sekolah.

(5) *Kemampuan Sosial Ekonomi Orang Tua*

- a. Masih banyaknya orang tua yang berpenghasilan rendah sehingga berpengaruh terhadap motivasi untuk menyekolahkan anak-anaknya;
- b. Masih rendahnya aspirasi dan apresiasi orang tua terhadap pendidikan, khususnya di lingkungan masyarakat marjinal.

(6) *Dukungan Masyarakat dan Dunia Kerja*

Secara umum, masyarakat kotamadya Bandung dapat merasakan perkembangan industri serta dunia usaha. Hal ini dapat dilihat dari daya serap angkatan kerja.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya mensukseskan Wajar Dikdas 9 Tahun, yaitu:

- a. Industri dan dunia usaha belum secara keseluruhan memberikan penghargaan (kompensasi) kepada karyawan berkaitan dengan latar belakang pendidikan. Dengan kata lain kurang dipertimbangkan besaran gaji antara lulusan SD 6 Tahun dengan lulusan SLTP/sederajat;
- b. Industri atau dunia usaha belum maksimal memberikan pengakuan yang sama terhadap para lulusan SLTP/sederajat;
- c. Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri seringkali menyebabkan penduduk sekitar yang berusia SLTP/sederajat cenderung memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan SLTP;
- d. Pengembangan daerah industri dan pemukiman seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendidikan.

*3. Urgensi Pemberdayaan Tim Koordinasi Meningkatkan Peran-serta Masyarakat Dalam Wajib Belajar 9 Tahun.*

Dari beberapa aspek yang diuraikan di atas, merupakan tantangan dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun di

kotamadya Bandung. Persoalan tersebut banyak faktor penyebabnya. Salah satu faktor penyebab antara lain belum optimalnya peranserta masyarakat. Peranserta tersebut diasumsikan erat kaitannya dengan kinerja peran dan fungsi Tim Koordinasi, baik secara internal maupun eksternal. Internal artinya bagaimana upaya agar dalam tim terjadi keterpaduan dalam tindakan (action) sehingga dihasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan harapan. Demikian pula bagaimana Tim Koordinasi Wajar Dikdas memberdayakan peranserta masyarakat, agar terlibat langsung dalam mendukung lembaga pendidikan terutama sekolah-sekolah yang ada.

Dalam PP.39 Tahun 1992 terdapat beberapa butir ketentuan tentang peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan meliputi: pendirian semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah. Pendidikan jalur sekolah tingkat SD, seperti pendirian SD, MI, SD-Kecil, dan SD-Kelas-Jarak-Jauh. Sedangkan pada tingkat SLTP, seperti pendirian SMP, MTs, SMP-Terbuka, SMP-Kecil, dan SMP-Kelas-Jarak-Jauh. Pendidikan Dasar yang berupa jalur luar sekolah baik setingkat SD maupun SLTP antara lain penyediaan tempat-tempat belajar.

kursus-kursus dan program Paket A dan Paket B serta Pondok Pesantren, termasuk masyarakat industri (yang menyediakan sarana pendidikan di tempat bekerja).

Hakikat peranserta masyarakat mengandung makna yang luas, artinya tidak hanya masyarakat atau kelompok yang langsung mendirikan lembaga pendidikan. Akan tetapi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti; bantuan tenaga kependidikan untuk pelaksanaan latihan bagi peserta didik, memberikan bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kependidikan. Dapat juga mendirikan dan menyelenggarakan program pendidikan yang belum diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan dan program pembangunan nasional. Selain itu menciptakan hubungan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar penyelenggara pendidikan yang bersangkutan (PP. NO.39 Tahun 1992).

#### B. Fokus Penelitian

Operasional penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung, yang ditangani oleh Tim Koordinasi Wajar Dikdas sesuai dengan peran dan fungsinya sampai saat ini masih menghadapi kendala-kendala.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun. Faktor internal dapat dilihat dari indikator-indikator dalam pengamatan empiris antara lain :

1. *Tingkat kehadiran rapat-rapat Tim Koordinasi Wajar Dikdas masih terbatas pada pembahasan laporan dari pihak Depdikbud sebagai leading sector.*
2. *Kurang berjalannya fungsi komponen Tim Koordinasi Wajar Dikdas sesuai dengan misi instansi terkait, hal ini dibuktikan oleh sering terlambatnya informasi yang seharusnya diterima dengan segera oleh Depdikbud sebagai leading sector. Sering terjadi pengambil alihan peran yang semestinya menjadi garapan instansi terkait, namun karena tidak berjalan maka ditindaklanjuti oleh Depdikbud.*
3. *Kesejajaran komunikasi dari tim masih ditemukan adanya kesenjangan, mengingat instensitas kerja penanggung jawab sebagai kepala pemerintahan yang sangat padat.*

Faktor tersebut di atas berimplikasi terhadap kinerja Tim Koordinasi Wajar Dikdas, sehingga faktor eksternal agaknya terabaikan atau kurang tergarap secara mantap. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator dalam pengamatan empiris antara lain :

1. Masih belum menampakkan hubungan timbal balik, maupun konsultatif antara Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung dengan lembaga legislatif dalam hal ini DPRD TK II kotamadya Bandung.
2. Masih belum menampakkan hasil hubungan timbal balik dalam perencanaan penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 tahun antara Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung dengan BAPEDA TK II.
3. Pemahaman peranserta dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun dari pihak masyarakat luas masih bervariasi, sehingga tingkat kepeduliannya pun bervariasi.

Bertitik tolak dari faktor-faktor yang dijelaskan di atas, maka sebagai fokus penelitian adalah intern tim koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun dalam memberdayakan peranserta masyarakat pada penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung.

Kondisi di atas, dipandang dari efektivitas dan optimalisasi *Tim Koordinasi* apabila tidak dilakukan pembenahan maka diperkirakan menimbulkan :

- a. Terjadi kemandegan program yang telah direncanakan secara kolektif, dan keberhasilan yang dicapai tidak menutup kemungkinan hanya perhitungan angka-angka di atas kertas tanpa diikuti dengan koreksi kolektif.
- b. Pemahaman peranserta masyarakat dalam turut mengambil

*bagian dalam penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun terbatas pada mendirikan lembaga pendidikan.*

*c. Tidak tercapainya target yang dicanangkan seperti amanat Presiden pada Rakernas Depdikbud Tahun 1996, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yakni dapat tercapainya penyelesaian pada tahun 2003/2004.*

Berkenaan dengan perkiraan di atas, perlu adanya suatu pemecahan atau salah satu jalan keluarnya. Studi ini akan mencoba berupaya ke arah mencari cara sebagai upaya pemberdayaan termaksud yang dipandang efektif dan menguntungkan semua pihak. Oleh sebab itu penelitian pemberdayaan Tim Koordinasi dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun dilakukan. Sedangkan peran serta masyarakat eksternal dari Tim Koordinasi Wajar Dikdas, penulis anjurkan untuk diadakan penelitian tersendiri oleh pihak lain yang berminat.

### C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah potensi-potensi masyarakat.

Potensi dapat dipandang dari internal Tim Koordinasi maupun eksternal yakni masyarakat (orang tua, LSM, Tokoh

masyarakat, dunia usaha/industri), di Kotamadya Bandung dapat berperanserta dalam pembangunan nasional khususnya penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun. Bagaimana potensi-potensi itu dapat ditumbuhkembangkan dan diwujudkan dalam peranserta yang dilandasi konsepsi. Maka rumusan masalah yang diajukan penulis adalah :

*"Bagaimana mekanisme Tim Koordinasi Wajar Dikdas dalam menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peranserta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kotamadya Bandung ?*

Dari rumusan di atas, lebih jelasnya dikemukakan pokok-pokok masalah yang dianalisis meliputi :

- 1. Bagaimana mekanisme kerja komponen instansi terkait dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di Kotamadya Bandung ?*
- 2. Bagaimana memberdayakan peran dan fungsi komponen instansi terkait, termasuk satuan-satuan lembaga pendidikan dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di Kotamadya Bandung ?*
- 3. Bagaimana gambaran hasil pemberdayaan Tim Koordinasi dalam peningkatan peranserta masyarakat pada penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kotamadya Bandung ?*

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

#### a. Secara Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang mekanisme Tim Koordinasi dalam memberdayakan peranserta masyarakat, sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kota-madya Bandung. Selain itu untuk memperoleh gambaran tentang SWOT-nya, kemungkinan implikasinya terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam peningkatan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan dasar.

#### b. Secara Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran empirik tentang :

- 1) Mekanisme operasional komponen instansi terkait dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung.
- 2) Pemberdayaan peran dan fungsi komponen instansi terkait, termasuk satuan-satuan lembaga pendidikan dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di kota-madya Bandung.

3) Hasil pemberdayaan peranserta masyarakat implikasinya terhadap pencapaian APK/APM dibandingkan dengan rencana penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung, serta analisis Swot-nya.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya pengembangan implementasi ilmu administrasi pendidikan, khususnya pada pengelolaan pendidikan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penelitian lebih lanjut terutama berkenaan dengan penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun.

### b. Aspek Praktis

Penelitian ini mengenai pemberdayaan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung. Hal tersebut dipandang penting untuk diteliti, karena sangat erat dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Wajar Dikdas. Dengan optimalnya mekanisme kerja Tim Koordinasi Wajar Dikdas, diharapkan bermanfaat dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana.

## E. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tidak bermaksud untuk mengungkapkan hubungan antar variabel melalui studi korelasi atau regresi untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi meneliti mengenai perilaku manusia dalam organisasi serta interkasi dengan lingkungan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode *analisis deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Pelaksanaan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling technique* (Bogdan & Biklen, 1982: Meleong, 1990). Dengan teknik ini diharapkan peneliti dapat bervariasi secara memadai, dan dapat memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu, sehingga dapat dipertentangkan atau dapat diisi sekedar adanya kesenjangan informasi yang ditemui.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi adalah studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Khusus dalam observasi dapat dilakukan melalui dua cara yakni observasi partisipasi langsung. Dari teknik-teknik itu diharapkan dapat saling mendukung atas data yang diperoleh dalam penelitian ini.

Langkah-langkah penelitian dilakukan melalui *tahap orientasi, eksplorasi, dan member check*. Sedangkan prosedur analisis data hasil eksplorasi yakni, *reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan serta verifikasi data*.



## G. Sistematika Penulisan Tesis

Laporan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pendekatan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Pelaksanaan Kebijakan Penuntasan Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di Lingkungan Kandep Depdikbud Kota-madya Bandung. *Bagian Pertama: Tinjauan Teoritis.* Meliputi, Konsepsi administrasi pendidikan, Konsepsi wajib belajar, Implementasi wajar Dikdas di Indonesia, dan Konsepsi peransera masyarakat. *Bagian kedua : Tinjauan empirik, dan Bagian ketiga: Relevansi dengan studi yang dilakukan.*

Bab III. Prosedur penelitian meliputi, metode penelitian, sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, langkah-langkah penelitian, prosedur analisis data, dan validasi temuan penelitian.

Bab IV. Analisis data dan hasil penelitian, meliputi beberapa informasi hasil pengumpulan data sesuai dengan permasalahan, dan tujuan yang direkayasa pada instrumen penelitian.

Bab V. Temuan dan pembahasan hasil penelitian, meliputi temuan-temuan informasi, yang selanjutnya dibahas sesuai

dengan teoritis yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Daftar pustaka

Lampiran-Lampiran

